

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA KOTA PONTIANAK**

Oleh:

**DEA ZAHARA APRIAYU**

NIM. E21112051

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

*[Email:dezaharaa1994@yahoo.com](mailto:dezaharaa1994@yahoo.com)*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat di kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Adapun masalah yang terjadi yaitu Penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba belum optimal, sumber daya yang belum terpenuhi dan kerjasama dengan pihak eksternal belum intens. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah BNN Provinsi Kalbar sebagai implementor, khususnya di bidang pencegahan kurang banyak melakukan penyuluhan atau sosialisasi di kalangan masyarakat khususnya mahasiswa di Universitas Tanjungpura dan kurang membangun kerjasama dan komunikasi dengan pihak luar atau masyarakat. Faktor kurangnya sumber daya yaitu kurangnya tenaga kerja di BNN Provinsi Kalbar serta sumber-sumber pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya buku-buku tentang bahaya narkoba maupun video-video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta media elektronik lainnya serta jarang melakukan tes urin terutama di universitas-universitas Kota Pontianak sehingga berdampak dari kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saran bagi BNN Provinsi Kalbar harus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan mengenai bahaya narkoba dan melakukan tes keseluruhan kampus-kampus di Pontianak khususnya di Universitas Tanjungpura karena pelajar atau mahasiswa adalah target utama pemerintah dalam mencegah penggunaan narkoba di usia dini. Serta harus lebih bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk melaporkan tindak narkoba di lingkungan sekitarnya

Kata-kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

## IMPLEMENTATION PROGRAM FOR PREVENTION OF MUNICIPALITY AND DISTRIBUTION OF DRUGS IN BNN WEST KALIMANTAN IN STUDENTS UNIVERSITY TANJUNGPURA STUDENTS TANJUNGPURA

### Abstract

The purpose of this study is to discuss drug abuse among Tanjungpura university students in Pontianak. The problem in this study is the fact that the information about drug abuse has not been socialised optimally. In addition, there is a lack of resources and lack of cooperation with external elements. The study used a qualitative approach with a descriptive design. It departed from a theory of Edward III i.e. communication, resources, disposition, and bureaucracy administration. Result of the study showed that as an implementer, BNN in West Kalimantan was less active in doing counselling or socialization to public, especially to Tanjungpura university student. Further, the agency did not a wide cooperation and communication with external elements or communities. Another factor was the lack of resources in BNN West Kalimantan, for example human resources and other supporting resources such as books or videos discussing about the danger of drugs. The agency was also reported to barely perform urine test especially to university student in Pontianak. Therefore, the lack of this preventive program could influence the students knowledge and understanding towards the danger of drug abuse and the illegal circulation of drugs. This study then recommends BNN to actively organize events which discusses the danger of drugs. Additionally, they should conduct urine test to all university students in Pontianak because the students are BNN's main target to prevent the use of drug in the early ages. Finally, the BNN should bulid a good cooperation with the community to report any drug abuse among their neighbourhood.

*Keywords: communication, resources, disposition, and bureaucracy structure*

### A. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran

gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Untuk mengatasi peredaran narkoba di kota Pontianak keberadaan BNN Provinsi Kalimantan Barat sangatlah diharapkan karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini

akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Untuk mengatasi peredaran narkoba di kota Pontianak keberadaan BNN Provinsi Kalimantan Barat sangatlah diharapkan karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Program ini merupakan program pemerintah dalam upaya untuk menangani permasalahan narkoba yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Kota Pontianak disebabkan penyalahgunaan narkoba sekarang ini merupakan masalah yang serius dan menjadi tanggung jawab warga masyarakat dan pemerintah Kota Pontianak.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak saat ini bukan hanya didominasi orang dewasa saja, namun sudah merambah pada usia remaja dan bahkan dikalangan pelajar. Hal ini disebabkan kondisi mental para remaja masih labil dan cepat terpengaruh. Pada dasarnya usia remaja adalah usia dimana rasa ingin tahu

akan sesuatu itu sangat tinggi. Asalkan ada kontrol yang baik dari para orang tua dilingkungan masyarakat, kontrol dari para guru melalui hal-hal positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, pengajian ilmu agama dan kegiatan positif lainnya.

Kota Pontianak sebagai ibukota Kalimantan Barat dapat disebut darurat Narkoba, karena Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar mencatat jumlah pengguna narkoba di Kabarp diperkirakan mencapai 1,7 persen atau setara 67 ribu pengguna narkoba dari jumlah penduduk Kalimantan Barat. Adapun Kota Pontianak sendiri masuk kategori darurat narkoba. Bagaimana tidak, dari data Satuan Reserse Narkoba (Satrestik) Polresta Pontianak, penangkapan para pelaku maupun pengguna narkoba yang ada di Kota Pontianak, terus mengalami peningkatan.

Badan narkotika Nasional (BNN) telah membentuk tiga bidang yaitu: Pemberantasan, Rehabilitasi Dan Pencegahan. Diharapkan dari ketiga bidang tersebut dapat menekan peredaran narkoba di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, dan dapat menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia dari kehancuran akibat narkoba yang telah menjalar hingga pelosok Nusantara. BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014

juga pernah membentuk Forum Masyarakat Anti Narkoba (Formas) Kota Pontianak yang bertujuan membantu tugas BNN berkaitan dengan kampanye dan pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba. BNN Kota Pontianak dan Formas Kota Pontianak juga berperan aktif dan berkelanjutan dalam memberikan informasi dan mengawasi pergerakan peredaran narkoba di 2.255 gang yang tersebar di 19 kelurahan dan 6 kecamatan.

Kebijakan P4GN merupakan salah satu upaya yang berkaitan untuk menjadikan lembaga pendidikan atau kampus bebas dari kejahatan dan peredaran narkoba. Untuk itu, diperlukan sebuah usaha dalam pelibatan seluruh komponen yang ada di lingkungan kampus terutama dari mahasiswa dan dosen melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kreatifitas dan kekeluargaan sehingga tumbuh sikap positif mahasiswa untuk berprestasi dalam proses pengembangan diri.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Mengimplementasikan Program P4GN

(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba) Pada Kalangan Mahasiswa di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya diajukan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat di Kalangan Mahasiswa Untan yang dirasakan masih belum maksimal.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat di kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis: mampu memberikan masukan tentang “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan

Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Pada Kalangan Mahasiswa di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.

2. Manfaat praktis: Dapat memberi suatu masukan berbagai pihak khususnya masyarakat dan pemerintah agar dapat bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pontianak.

### **Tinjauan Pustaka**

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena baru berkembang pesat di Amerika Utara dan Eropa setelah perang dunia kedua. Ilmu ini sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan sinisme terhadap ilmu politik oleh karena ilmu politik dipandang tidak aplikabel, tidak praktis dan lebih bersifat analisis teoritis belaka (Badjuri & Yuwono, 2003:7).

Kemudian Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Sedangkan Edwards III (2008:25) mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam arti proses ini diawali oleh pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

## B. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum atau deskripsi tentang apa yang diteliti. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran umum tersebut, peneliti mendasarkan asumsi pada program P4GN pada BNN Provinsi Kalbar.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dalam bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan wawancara peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan yang selanjutnya pertanyaan tersebut diperdalam.



## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung dengan cara mengumpulkan data serta mencatat gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Alat yang digunakan adalah daftar ceklist.

## 3. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian alangkah lebih baiknya dilengkapi dokumentasi guna memperkuat fakta – fakta di lapangan, dari metode-metode lain mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Alat yang digunakan yaitu buku catatan dan kamera.

## Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang peneliti pilih adalah mereka yang mengetahui dan memahami masalah tentang Program P4GN di BNN Provinsi Kalbar yaitu :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Badan Narkotika Nasional Provinsi  
(BNNP) Kalbar

2. Kepala Seksi Konsolar Adiksi BNN  
Kota Pontianak

3. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa  
Peduli Napza Universitas Tanjungpura.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif. Dalam penyajian data kualitatif, analisis data yang digunakan merupakan proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data kualitatif akan diarahkan pada uraian tentang Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Kalimantan Barat Pada Kalangan Mahasiswa di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dapat dikembangkan pendeskripsian dan sekaligus interpretasi atau hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan BNN Provinsi Kalbar dengan pihak terkait sudah cukup baik dan mendapat respon baik dari pihak tertentu. Hal ini memberikan terbukanya peluang untuk BNN Provinsi Kalbar dalam melaksanakan program P4GN di seluruh sekolah, universitas ataupun lembaga lainnya yang ada di Pontianak khususnya. Tetapi sangat disayangkan sekali bahwa Universitas Tanjungpura sebagai salah satu Universitas terbesar di Pontianak kurang memiliki perhatian oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan hanya memiliki kader-kader di beberapa fakultas saja. Hal ini sangat tidak efektif dan efisien mengingat Universitas Tanjungpura memiliki banyak fakultas yang seharusnya di setiap fakultas harus memiliki perwakilan kader yang dibentuk langsung oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat.

### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia di BNN Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa jumlah pegawai atau staf masih sangat kurang karena staf sedikit kewalahan terhadap pekerjaan yang sangat menyita waktu dan tenaga disebabkan karena

kegiatan di luar kantor atau bepergian ke luar kota. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi efektifitas implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pencegahan Gelap Narkoba. Jika kondisi seperti ini hanya diabaikan begitu saja maka keberhasilan suatu program akan mengalami hambatan dan program yang diimplementasikan menjadi lamban serta tujuan dari kebijakan akan sulit untuk dicapai.

### **Disposisi**

Para tenaga kerja sudah diberi tugas sesuai keahliannya masing-masing. Hal itu membuktikan mereka sudah terlatih dan mempunyai keahlian khusus untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Para staf juga memiliki tugas di lapangan. Sebenarnya hal ini sudah berjalan sesuai dengan pedoman kerja mereka, tetapi masih belum berjalan maksimal karena tidak sebanding dengan kasus narkoba yang memang sangat merajalela sekarang ini.

### **Struktur Birokrasi**

BNN Provinsi Kalbar pastinya sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas. Hanya saja kasus narkoba ini sudah di tahap yang mengkhawatirkan, agar segala visi dan misi bisa tercapai memang harus memiliki



tekad yang kuat dalam bekerja karena dalam hubungannya dengan Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks, menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Kerjasama ini hanya mungkin terdapat dalam birokrasi yang mempunyai struktur yang ideal dengan pembagian tugas yang jelas. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

#### **D. KESIMPULAN**

##### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

##### **2. Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

##### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

##### **4. Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Maka dari itu jika semuanya bisa berjalan secara berdampingan segala aspek harus dimaksimalkan.

## E. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kualitas komunikasi yang dilakukan khususnya komunikasi kepada masyarakat terutama dalam bentuk sosialisasi. Hal ini agar masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa dapat memahami dengan baik tujuan dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Faktor sumber daya merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi program P4GN, oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas personil atau staff di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu penambahan tenaga personil staf di BNN Provinsi Kalimantan Barat juga perlu ditingkatkan agar sosialisasi yang dilakukan lebih komprehensif kepada masyarakat.
3. Harus lebih menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka

mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## F. REFERENSI

- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Badjuri & Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Bogdan & Taylor. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Carl Friedrich. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- David William dalam Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Edwards III. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI
- Masyhuri & Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung. Refika Aditama.

Putra & Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Amin. 2015. *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*. Yogyakarta. Media Akademi.

Moleong.2000.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Norman K.Denzin. 2011. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Gramedia.

Robert E.Stake.2011. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Saebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia.

Sugiyono. 2011.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung :Alfabeta cv

\_\_\_\_\_.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R&D*.Bandung:Alvabeta cv.

Strauss & Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.

Thomas R. Dye. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI

Van Meter dan Van Horn. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Wahab, Abdul Solikhin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijakasanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Wursanto, Ig.2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

### **Skripsi**

Rifqy Fadzrin (2014) dengan judul “Implementasi Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Singkawang

Meli Udana (2013) dengan judul “Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Kota Pontianak

### **Blog / Website**

Mata Kalbar : 8 Februari 2015  
Pontianak.tribunnews.com

[www.suarapemredkalbar.com](http://www.suarapemredkalbar.com)

[www.prokal.com](http://www.prokal.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Kamus Bahasa Indonesia Online,  
[kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)







LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DEA ZAHARA A.  
NIM / Periode lulus : E2112051 / IV  
Tanggal Lulus : 24 Mei 2017  
Fakultas/ Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : dezaharaa1999@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ... Publika ... \*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat di kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara fulltext  
☐ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui, disetujui

Pengelola Jurnal

Dibuat di

Pada tanggal : 25 Juli 2017.

NIM. E2112051

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)